

PERANAN APARATUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA BUDAYA WATU PINABETENGAN¹

Oleh : Derby F. Roring²

Abstrak

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang harus menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan objek wisata aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus berperan dengan baik bekerja optimal guna mengembangkan objek wisata Watu Pinabetengan sehingga objek wisata ini dapat dikenal keberadaannya dengan budaya dan nilai sejarah yang kental demi tercapainya tujuan pengembangan objek wisata.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peranan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata budaya watu Pinabetengan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu medeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh lewat observasi dan analisa subjek dan objek.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisa penulis mendapatkan bahwa peranan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum melaksanakan tugas dengan optimal menjalankan tugas dan fungsi dalam pengembangan objek wisata budaya watu Pinabetengan. untuk itu demi berkembangnya dengan baik objek wisata budaya Watu Pinabetengan ini, aparatur Dinas pariwisata dan kebudayaan dituntut untuk melakukan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Peranan, Aparatur, Pengembangan, Wisata Budaya.

PENDAHULUAN

Peranan Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan merupakan hak dan kewajiban yang memang harus dijalankan oleh setiap apratur Dinas yang memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan diantaranya adalah melaksanakan kerjasama, monitoring, evaluasi, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi pariwisata.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

Ada begitu banyak objek wisata yang menjadi kewajiban dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan salah satunya adalah objek wisata Budaya Watu Pinabetengan. Objek wisata budaya ini merupakan objek wisata budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya yang kental serta dipercaya memiliki nilai sakral.

Aparatur dinas sangat diharapkan bekerja dengan maksimal menjalankan tugas dan fungsi yang ada dalam mengembangkan objek wisata Watu Pinabetengan karena berhasil tidaknya, berkembang atau tidak objek wisata ini sangat ditentukan oleh peranan aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana upaya aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata budaya watu Pinabetengan? sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya dari aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Minahasa dalam mengembangkan objek wisata budaya watu pinabetengan.

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya akademis, khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Peranan Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi yang cukup penting bagi aparatur dinas yang ada di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Minahasa untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto (2002:243).

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu

yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 246).

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soerjono Soekanto, 2002 : 247).

Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peranan yaitu:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571), Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwodarmita maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya. Apabila individu diharapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma. Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan.

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidangnya, yang selanjutnya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa (Peraturan Bupati Minahasa No. 13 Tahun 2008).

Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa dalam kaitannya dengan yaitu:

1. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata

3. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi pariwisata
4. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan objek wisata
5. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja
6. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan objek wisata
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian perkembangan objek wisata

Konsep Aparatur

Aparat adalah alat pemerintahan atau Negara atau juga merupakan sebagai orang-orang yang menduduki jabatan (pegawai negeri) dalam kelembagaan pemerintah. Aparat pemerintah daerah yaitu keseluruhan dari badan-badan yang ada dibawah Presiden yang berada di daerah, baik yang berada dibawah lembaga departemen maupun dibawah lembaga non departemen yang melaksanakan roda pemerintahan di daerah (Situmorang dan sitanggang, 1994:11)

Aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian (Handyaningrat, 1982:154).

Konsep Pengembangan Objek Wisata

Menurut Paturusi (2001) Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi para wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun pemerintah.

Yoeti menegaskan bahwa pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar, dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan dan menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan (Yoeti 1996:53)

Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. (Alim Sumarno, 2012)

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Minahasa No. 13 Tahun 2008 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan monitoring, Koordinasi dan pengembangan objek wisata.

Menurut Pendit (2002:20) Pengembangan objek wisata sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek wilayah, aspek pemerintah, aspek masyarakat dan pihak swasta didalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan objek wisata berkaitan dengan :

- a. Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi objek wisata
- b. Efektifitas fungsi dan peran objek wisata ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait

c. Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan objek wisata

d. Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata

Dari beberapa konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan objek wisata merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki suatu tujuan wisata, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

Konsep Wisata Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wisata adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu juga dapat diartikan sebagai bertamasya atau piknik.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya adalah pikiran; akal budi; adat istiadat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.

Budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya (malinowski, 1983:21).

Budaya itu akan mengalami perubahan, ada waktunya lahir, tumbuh, maju, berkembang, berbuah, menjadi tua dan mati seperti hidup manusia. Ki Hajar Dewantara (1994:74).

Menurut Nyoman S. Pendit (1999:42) Wisata Budaya merupakan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

Wisata budaya adalah gerakan atau kegiatan wisata yang dirangsang oleh adanya objek-objek wisata yang berwujud hasil-hasil seni budaya setempat : adat istiadat, upacara agama, tata hidup masyarakat, peninggalan sejarah, hasil seni, kerajinan-kerajinan rakyat dan sebagainya (R. S. Damardjati, 1989:19).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan yang ada yakni peranan aparatur Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Minahasa dalam menjalankan peranannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam peraturan Bupati No. 13 Tahun 2008.

Menurut Flick (2002:81) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil, secara

apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu peranan aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan didalamnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban, kendala dan upaya-upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang merupakan sumber informasi penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu 1 Kepala Bidang Pariwisata, 1 Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi, 1 Kepala Bidang Kebudayaan, 1 Kepala Seksi Objek Wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 1 informan Pemerintah Desa Pinabetengan, 1 informan masyarakat Desa Pinabetengan, 1 informan pengelola objek wisata Watu Pinabetengan dan 1 informan wisatawan.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto 2002:143), ini berarti data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi dengan cara melihat, memandang dan mengamati peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata Watu Pinabetengan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. (Setyadin 2005:22), data diperoleh melalui wawancara atau komunikasi yang dilakukan secara umum yaitu kepada Pengelola Objek wisata, masyarakat, pemerintah dan wisatawan, selanjutnya dilakukan wawancara khusus kepada aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis (Bungin 2008:121). Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang relevan adalah Reduksi Data (*data reduction*); paparan data (*data display*); dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Miles dan Huberman (1992:17).

Dengan demikian, maka dapat digambarkan teknik analisa data yang dilakukan yaitu setelah data dikumpulkan, maka akan dipilih hal-hal yang pokok dan akan difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian diuraikan secara tersusun dalam bentuk kalimat dengan memberikan adanya penafsiran dan penarikan kesimpulan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian atau informan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas Pokok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang pariwisata dan budaya yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan
- c. Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata dan kebudayaan
- d. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pemberian pertimbangan teknis atas izin usaha pariwisata
- e. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata
- f. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata
- h. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi pariwisata
- i. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata
- j. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri
- k. Pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba
- l. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian
- m. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian
- n. Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan
- o. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan
- p. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan museum
- q. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- r. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- s. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

B. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dilihat Dari Hak dan Kewajiban Dalam Pengembangan Objek Wisata Watu Pinabetengan

Peranan Dinas dalam pengembangan objek wisata merupakan suatu hak dan kewajiban dalam melaksanakan dan merumuskan kewenangan otonomi daerah dibidang pariwisata yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan prinsip menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya dan hak asasi manusia.

Hal ini dimaksudkan agar supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, melestarikan lingkungan alam mengangkat citra bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Objek Wisata NK mengatakan pengembangan objek wisata budaya ini perlu untuk dikembangkan, sebagai kepala seksi objek wisata saya sudah memberikan masukan kepada Kepala Dinas untuk pengembangan objek wisata ini namun harus diakui, perlu peningkatan lagi dari aspek fasilitas yang memang kurang memadai seperti jalan lingkaran dan *resting area*. Selain itu ada beberapa tugas dari dinas pariwisata dan kebudayaan yang memang belum optimal dilaksanakan seperti penyusunan rencana dan program kerja yang belum terprogram dengan baik yang mempengaruhi tugas-tugas lain. Dan hal ini menjadi kekurangan dari kami untuk menjalankan peranan dalam mengembangkan objek wisata Watu Pinabetengan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan, GT mengatakan kebudayaan yang ada di Minahasa memang perlu dikembangkan khususnya kebudayaan dari objek wisata Watu Pinabetengan. Ini harus menjadi perhatian penting bagi masyarakat Minahasa untuk melestarikan kebudayaan dari objek wisata Watu Pinabetengan. Kami juga yang menangani bidang kebudayaan memang belum sepenuhnya menjalankan tugas walaupun sudah melaksanakan beberapa program yaitu Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan wisata, memberikan pelatihan juga dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan objek wisata budaya Watu Pinabetengan lewat pemeliharaan cagar budaya, pembinaan kepada juru jaga yang dilakukan rutin tiga bulan sekali. Watu Pinabetengan memiliki nilai sejarah yang seharusnya dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Kami juga sudah membuat *leaflet* dan *guide book* dalam rangka pengembangan budaya namun harus diakui hal itu belum cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebudayaan, khususnya Budaya dari objek wisata ini. Sebetulnya pemberian penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah selama ini belum dilakukan hal ini terjadi karena ini belum diprogramkan. Namun, kami akan berusaha untuk melaksanakan setiap tugas tanggungjawab untuk pengembangan budaya yang lebih baik.

Adapun wawancara dengan pengelola objek wisata ini AR mengatakan bahwa objek wisata Watu Pinabetengan ini harus dikembangkan dan dilestarikan karena objek wisata ini memiliki nilai sejarah dan merupakan identitas bagi masyarakat minahasa yang harus diperkenalkan dan dikenal oleh banyak orang. Sebetulnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berperan dengan baik dalam pengembangan objek wisata ini namun jika dilihat dari kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini, masih ada beberapa peranan yang belum dilakukan secara maksimal oleh dinas yang dimaksud yaitu belum adanya

kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan objek wisata karena lokasi objek wisata ini kurang kondusif, harus ada penambahan fasilitas seperti perpustakaan yang didalamnya ada buku-buku tentang kebudayaan, karya-karya ilmiah mengenai objek wisata Watu Pinabetengan.

Wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Desa IK, mengatakan bahwa Dinas Pariwisata belum menunjang sepenuhnya karena sejak beberapa tahun tidak ada perubahan dalam menata lingkungan sekitar termasuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan guna melayani pengunjung agar dapat memperoleh kesan yang baik termasuk mencintai budaya yang ada.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Pinabetengan, RL mengatakan suatu objek wisata akan sangat baik apabila dikembangkan, dengan dikembangkannya objek wisata ini sebetulnya dapat meningkatkan pendapatan lewat retribusi. Namun sampai sekarang dinas belum berperan aktif dalam pengembangan objek wisata Watu Pinabetengan karena pelayanan yang belum maksimal seperti fasilitas yang masih kurang dan fasilitas yang belum diperbaiki, tempat yang harus ditata dengan baik. Selain itu juga kalau kita lihat ada pihak swasta yang menyelenggarakan kegiatan untuk mengadakan upacara adat setiap tahunnya, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dinas pariwisata dan kebudayaan yang harus lebih aktif dari pada pihak lain. Saya harapkan dinas dapat berperan dengan baik supaya objek wisata ini dapat dikembangkan, harus ada penataan kembali tempat ini, kontrol yang benar serta adanya promosi yang efektif supaya objek wisata ini dapat berkembang dan dapat diminati banyak orang.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas belum berperan aktif dalam rangka mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan ini dilihat dari hak dan kewajiban dalam hal ini tugas dari dinas yang belum dilaksanakan dengan efektif. Namun seperti yang dijelaskan diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berusaha menjalankan peranan mereka dalam mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan dengan melaksanakan sebagian tugas yang mejadi kewajiban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.

C. Kendala Untuk Implementasi Peranan Dinas Dalam Pengembangan Objek Wisata Watu Pinabetengan

Kendala merupakan suatu hal yang dapat membatasi peranan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diatur demi terpenuhinya atau terealisasinya dengan baik tugas yang telah diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena jika hal ini dibiarkan kemungkinannya setiap tugas-tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, masing-masing memberikan pendapat tentang hambatan dan kendala dari Dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata, SS mengatakan dalam pengembangan objek wisata pasti ada biaya, dan kalau tidak diprogramkan pasti tidak akan ada biaya jadi salah satu hambatan dan kendala dari dinas sendiri dalam mengembangkan objek wisata ini adalah biaya karena untuk

mengembangkan objek wisata dalam pengadaan fasilitas, pasti memerlukan yang namanya biaya, sehingga kalau ada biaya pasti setiap objek wisata yang ada di Minahasa khususnya objek wisata budaya Watu Pinabetengan dapat dikembangkan dengan baik.

Wawancara dengan Kepala Seksi Objek Wisata, NK mengatakan memang hambatan dan kendala ini disebabkan karena kurang memahaminya tugas dari dinas pariwisata dan kebudayaan sendiri. Belum dikembangkannya dengan baik objek wisata budaya Watu Pinabetengan karena masih begitu banyaknya objek wisata yang harus dikembangkan dan dengan banyaknya objek wisata ini sangat memerlukan anggaran yang tidak sedikit, karena jika pengembangan dilakukan serentak, pasti pengembangan dari objek wisata tidak akan optimal, sehingga dinas pariwisata dan kebudayaan harus mengembangkan objek wisata tahap demi tahap sesuai dengan prioritas dan program yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan peranan dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan dibatasi dengan anggaran karena juga dilihat dari objek wisata yang ada, yang sebenarnya dinas mampu berperan aktif sekalipun belum optimal dalam mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan.

D. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pengembangan Objek Wisata Watu Pinabetengan Berdasarkan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Upaya untuk menjalankan peranan dalam pengembangan objek wisata Watu Pinabetengan merupakan suatu reaksi dan respons yang seharusnya dilakukan demi tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam suatu peraturan.

Setelah dilakukan wawancara dengan wisatawan, IS mengatakan bahwa yang saya lihat sejauh ini memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata ini diantaranya pemantauan lokasi dari dinas pariwisata dan kebudayaan, namun sampai saat ini beberapa kali saya datang belum ada tindaklanjut dari dinas untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata SS dan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi IR ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata ini diantaranya :

1. Monitoring dan Pendataan Objek Wisata

Dalam hal monitoring dan pendataan objek wisata Watu Pinabetengan Pemantauan yang dimaksud yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengunjungi dan melakukan pemantauan langsung dilokasi objek wisata Watu Pinabetengan dan melakukan pendataan fasilitas yang dibutuhkan dan fasilitas yang harus diperbaiki

2. Pembinaan

Pembinaan yang merupakan proses atau usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam hal ini melatih bahkan memberikan bimbingan kepada pengelola objek wisata khususnya pengelola objek

wisata Watu Pinabetengan untuk membimbing pengelola untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung di objek wisata khususnya Watu Pinabetengan sehingga ada pelayanan yang baik berupa informasi tentang watu pinabetengn yang diberikan kepada wisatawan yang datang berkunjung

3. Promosi

promosi pariwisata dilakukan melalui pameran HUT Minahasa dengan memfasilitasi potensi-potensi yang ada. Namun dengan waktu yang sangat terbatas karena hanya dilakukan setahun sekali maka promosi yang dilakukan belum membawa perubahan yang maksimal.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas sebenarnya dinas sudah berupaya menjalankan peranan mereka demi pengembangan objek wisata Watu Pinabetengan namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan, tak lepas dari usaha, kerja keras bahkan kerjasama yang baik demi terciptanya dan tercapainya suatu tujuan yang baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, penulis menarik kesimpulan bahwa aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini belum berperan secara optimal dalam rangka mengembangkan objek wisata budaya Watu Pinabetengan ini dapat dilihat dari :

1. Promosi yang dilakukan oleh Dinas pariwisata dalam pameran yang dilaksanakan tidak efektif karena hanya dilakukan setahun sekali pada HUT Kabupaten Minahasa
2. Pengembangan dalam hal fasilitas yang belum memadai seperti *resting area*, Jalan lingkar sehingga mengurangi daya tarik dan minat dari wisatawan untuk berkunjung, Semua dikarenakan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan dari objek wisata watu Pinabetengan.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, program kerja dan evaluasi secara tertulis demi pengembangan objek wisata Watu Pinabetengan dikarenakan kelalaian melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan bupati no. 13 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada bahwa aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal menjalankan tugas, maka penulis memberikan masukan :

1. Promosi objek wisata watu Pinabetengan jangan hanya dilakukan lewat pameran yang diadakan 1 tahun sekali lewat HUT Kabupaten Minahasa, tetapi juga lewat media sosial dan atraksi-atraksi kegiatan yang dapat diketahui wisatawan dan dapat menarik perhatian dan minat wisatawan untuk berkunjung di objek wisata Watu Pinabetengan.
2. Adanya penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada di objek wisata Watu Pinabetengan, karena hal ini dapat menjadi faktor penyebab tidak

adanya atau menurunnya minat dan rasa ingin berwisata di objek wisata Watu Pinabetengan.

3. Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus meningkatkan kreatifitas dan Kinerja dalam pengembangan objek wisata dan menjalankan tugas dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 13 tahun 2008 diantaranya Kerjasama dengan Pihak swasta, merencanakan dan membahas program-program pengembangan objek wisata dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan yang jelas dalam bentuk laporan tertulis yang rutin, sehingga laporan yang ada dapat dijadikan bahan evaluasi dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata Watu Pinabetengan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntu, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. B. 2008. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Damardjati, R S. 1989. *Wisata Budaya*. Jakarta: Pustaka Umum.
- Dewantara, Hadjar Ki, 1994, *Kebudayaan*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta
- Flick, U. 2002. *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Giroth, Lexie.M, 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Indrapura
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handyaningrat, Suwarno (1982). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B. , dan Huberman, A. M. Tanpa tahun. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan oleh Tjepjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press.
- Malinowski, Bronislaw. 1983. *Dinamika Bagi Perubahan Budaya. Satu Penyiasatan Mengenai Perhubungan Ras di Afrika*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia: Malaysia.
- Nyoman S. Pendit. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar perdana*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita.
- Paturusi, Samsul A. 2001, *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Bali.
- Pendit, N. S, 1999, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Penerbit, PT. Anem Kosong Anem.
- Poerwodarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Setyadin, B. 2005. *Desain dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Modul IV disajikan dalam Penataran Tenaga Fungsional Akademik Politeknik Kotabaru, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, Kotabaru Kalimantan Selatan, 15-22 Februari 2005.

- Sumarno, Alim. (2012). Model Pembelajaran Kooperatif. (<http://elearning.unesa.ac.id/myblog/alim-sumarno/modelpembelajarankooperatif>) Di akses 03 Maret 2012.
- Soekanto, Soerjono. 2002, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yoeti, A. Oka. Edisi Revisi 1996 *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Bahan Lain

- Undang-undang No. 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata.
- Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2008, Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.